



---

## **EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS ANGGARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

### ***Efficiency and Effectiveness of Road Infrastructure Development Budget in South Sulawesi Province***

**Andi Haidir Zaenal<sup>1\*</sup>, Abd. Rahim<sup>2</sup>, Basri Bado<sup>3</sup>,  
Muhammad Imam Ma'ruf<sup>4</sup>, Diah Retno Dwi Hastuti<sup>5</sup>**

<sup>1\*,2,3,4,5</sup> Universitas Negeri Makassar, Indonesia

\*e-mail: [andihaidir1823@gmail.com](mailto:andihaidir1823@gmail.com)

---

**Article History:** Received: November 19, 2025; Revised: November 29, 2025; Accepted: November 30, 2025

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dalam kerangka *Value for Money*. Analisis difokuskan pada dua indikator utama, yakni efisiensi penyerapan anggaran sebagai representasi pemanfaatan input fiskal dan efektivitas capaian kemantapan jalan sebagai ukuran pencapaian hasil pembangunan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efisiensi anggaran mengalami variasi sepanjang periode pengamatan, sementara efektivitas capaian kemantapan jalan cenderung stabil relatif terhadap target yang ditetapkan. Meskipun demikian, identifikasi terhadap dinamika kedua indikator tersebut mengungkap adanya ketidaksejajaran struktural, khususnya ketika peningkatan realisasi anggaran tidak diikuti oleh pencapaian hasil fisik yang sepadan. Fenomena tersebut mengindikasikan perlunya penelaahan lebih mendalam terhadap proses perencanaan, pengadaan, serta pengawasan mutu pada pembangunan infrastruktur jalan. Penelitian ini menegaskan bahwa penilaian kinerja anggaran tidak dapat berhenti pada tingkat serapan, tetapi harus mempertimbangkan kesesuaian antara penggunaan sumber daya dan hasil pembangunan yang dihasilkan. Implikasi penelitian menekankan urgensi penerapan perencanaan berbasis kinerja, peningkatan tata kelola pengadaan, dan penguatan mekanisme monitoring untuk memastikan tercapainya nilai publik yang optimal.

**Kata kunci:** Anggaran Pembangunan; Efisiensi Anggaran; Efektivitas Anggaran; Belanja Infrastruktur.

---

#### **ABSTRACT**

*This study aims to evaluate the performance of road infrastructure development budget management in South Sulawesi Province using a quantitative descriptive approach within the Value for Money framework. The analysis focuses on two main indicators: budget absorption efficiency as a proxy for fiscal input utilization and road stability effectiveness as a measure of development outcomes. The study's findings indicate that budget efficiency varied throughout the observation period, while road stability effectiveness tended to remain stable relative to the established targets. However, identifying the dynamics of these two indicators revealed structural misalignments, particularly when increased budget realization was not accompanied by commensurate physical outcomes. This phenomenon indicates the need for a more in-depth review of the planning, procurement, and quality control processes in road infrastructure development. This study emphasizes that budget performance assessment cannot stop at the absorption*

---



---

*level but must consider the alignment between resource use and resulting development outcomes. The implications of the study emphasize the urgency of implementing performance-based planning, improving procurement governance, and strengthening monitoring mechanisms to ensure optimal public value is achieved.*

**Keywords:** Development Budget; Budget Efficiency; Budget Effectiveness; Infrastructure Spending

---

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan sektor infrastruktur merupakan faktor esensial dalam upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi regional. Di Provinsi Sulawesi Selatan, infrastruktur, khususnya jalan, memegang peranan strategis sebagai penopang utama konektivitas dan distribusi barang di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi ketimpangan antarwilayah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini didukung oleh berbagai literatur ekonomi pembangunan yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang baik adalah pondasi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan (Wayan *et al.*, 2021; Sari, 2023).

Jalan dapat diartikan sebagai fasilitas transportasi darat yang meliputi semua komponen pendukungnya, seperti bangunan pelengkap dan sarana penunjang jalan, yang digunakan untuk menunjang mobilitas lalu lintas manusia maupun barang, yang mencakup semua dimensi spasial, baik itu di daratan, di bawah tanah, di permukaan air, maupun di kedalaman air. Infrastruktur jalan memiliki peran yang sangat vital dalam menunjang mobilitas manusia dan distribusi barang. Tanpa adanya jaringan jalan yang memadai, kegiatan sosial maupun ekonomi masyarakat akan mengalami hambatan (Kristiano *et al.*, 2019).

Anggaran merupakan instrumen perencanaan formal yang didokumentasikan secara tertulis, berfungsi untuk merepresentasikan seluruh aktivitas operasional suatu entitas atau organisasi dalam terminologi numerik, umumnya dinyatakan dalam satuan mata uang untuk periode waktu tertentu. Selain berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, anggaran juga berperan sebagai alat koordinasi antarbagian dalam organisasi, sehingga seluruh kegiatan yang direncanakan dapat tersusun secara terpadu, terarah, dan selaras dengan tujuan organisasi secara keseluruhan (Widyawati, 2025). Pengelolaan anggaran belanja merupakan elemen kunci dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah, terutama dalam sektor infrastruktur (Mardiasmo, 2018).

Akan tetapi, pengelolaan dana publik di sektor infrastruktur sering kali menghadapi tantangan berat terkait akuntabilitas dan kinerja. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional secara eksplisit menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan harus memenuhi prinsip tepat mutu, tepat biaya, tepat waktu, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketentuan ini muncul sebagai respons terhadap persepsi umum

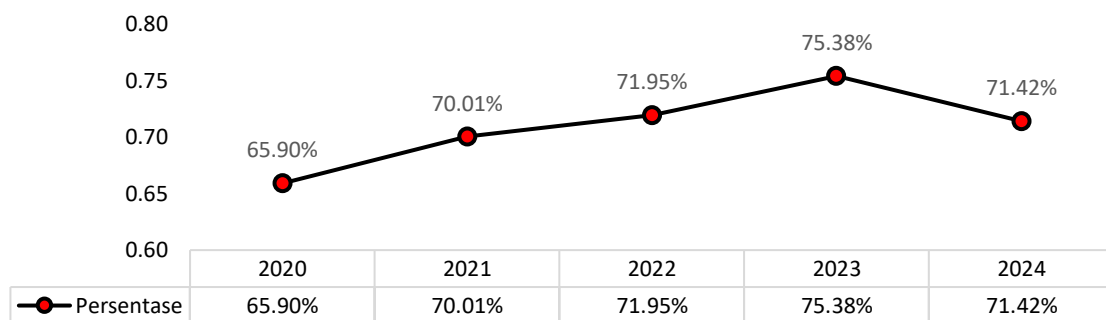
bahwa organisasi sektor publik kerap dinilai kurang efisien, rentan terhadap pemborosan, dan mengalami kerugian dalam pengelolaan sumber daya.

Efisiensi didefinisikan sebagai upaya memperoleh hasil (*output*) yang paling optimal dengan membatasi *input* yang tersedia, atau sebaliknya, memanfaatkan sumber daya (*input*) seminimal mungkin untuk mencapai *output* yang telah ditentukan (Mardiasmo, 2018). Efektivitas merupakan elemen utama dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi, program, ataupun kegiatan. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan atau target yang telah diagendakan (Arisandy, 2021). Oleh karena itu, *Value for Money* (VfM) yang menekankan aspek Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas, menjadi kerangka evaluasi utama untuk menilai kinerja anggaran daerah.

Konsep *Value for Money* (VfM) merupakan salah satu prinsip penting dalam manajemen organisasi sektor publik dan sering disebut sebagai inti dari kerangka kerja pengukuran hasil kerja di sektor terkait. Konsep ini menekankan pada pengelolaan sumber daya publik secara optimal melalui tiga komponen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, yang bersama-sama menjadi dasar dalam menilai sejauh mana kinerja organisasi publik memberikan nilai manfaat terbaik bagi masyarakat. VfM merupakan inti pengukuran kinerja pada sektor organisasi pemerintahan (Zanuardi *et al.*, 2020).

Penerapan VfM tidak hanya menilai keberhasilan serapan anggaran sebagai indikator efisiensi, melainkan juga mengukur sejauh mana kemantapan jalan (*outcome*) memberikan manfaat yang sepadan dengan biaya publik yang dikeluarkan. Dengan demikian, kerangka VfM menjadi alat untuk mengidentifikasi potensi *mismatch* antara anggaran (*input*), volume pekerjaan (*output*), dan kemantapan jalan (*outcome*). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih utuh terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan infrastruktur.

Dalam konteks DBMBK Provinsi Sulawesi Selatan, fluktuasi nilai kemantapan jalan dan serapan anggaran pada 2020–2024 memperlihatkan adanya ketidaksejajaran yang menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi *research gap* dengan menguji hubungan efisiensi serapan anggaran dan efektivitas capaian kemantapan jalan serta mengidentifikasi potensi efisiensi semu.



**Gambar 1. Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sulawesi Selatan**

Sumber: DBMBK Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2025

Secara spesifik, pemeriksaan terhadap data anggaran dan realisasi Kemantapan Jalan memunculkan kesenjangan yang kontradiktif, terutama pada periode terakhir. Pada tahun 2024, efisiensi penyerapan anggaran mencapai 95,98%, yang secara kategoris tergolong cukup efisien dan didukung oleh peningkatan realisasi anggaran yang sangat signifikan. Namun demikian, capaian kemantapan jalan justru mengalami penurunan menjadi 71,42% dari target 75,08%. Perbedaan antara tingginya penyerapan anggaran dan menurunnya capaian kinerja fisik tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara input dan outcome, yang dalam literatur Akuntansi Sektor Publik kerap disebut sebagai fenomena 'efisiensi semu'. Indikasi ini menunjukkan perlunya penelaahan lebih mendalam terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan teknis dalam pembangunan infrastruktur jalan.

Meskipun belanja modal memiliki peran penting dalam pembangunan, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam mencapai efisiensi anggaran. Tantangan tersebut meliputi perencanaan yang kurang matang, proses pengadaan yang lambat, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran (Santoso, 2023). Selain itu, sering terjadi perbedaan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi, yang mengakibatkan penurunan efektivitas penggunaan dana publik (Widodo, 2022).

Terdapat banyak penelitian mengenai kinerja anggaran daerah sering kali menunjukkan hubungan yang kompleks antara Efisiensi dan Efektivitas. Beberapa studi seperti Rachmawati & Suryanto (2020), dan Putra (2021) menyimpulkan bahwa hubungan antara Efisiensi terutama serapan anggaran dan Efektivitas pencapaian hasil di pemerintah daerah di Indonesia cenderung lemah dan tidak signifikan. Temuan ini konsisten dengan argumen Mahmudi (2019) yang menyatakan bahwa kedua dimensi kinerja ini tidak selalu bergerak searah. Penelitian lain menekankan bahwa efisiensi pembangunan infrastruktur dipengaruhi oleh perencanaan dan kebijakan fiskal (Kristiano, 2019). Meskipun demikian, sebagian besar masih berfokus pada rasio agregat tanpa mengaitkan secara spesifik anomali serapan anggaran terhadap degradasi kualitas fisik aset.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian mengenai kinerja anggaran pembangunan infrastruktur, khususnya melalui penerapan kerangka *Value for Money* pada sektor jalan provinsi. Berbeda dari studi-studi sebelumnya yang umumnya menitikberatkan penilaian efisiensi pada besaran serapan anggaran semata, penelitian ini menghadirkan pendekatan analitis yang lebih komprehensif dengan menguji koherensi antara efisiensi fiskal dan efektivitas outcome fisik, yaitu tingkat kemantapan jalan. Dengan memanfaatkan data terbaru periode 2020–2024, penelitian ini mampu menangkap dinamika pengelolaan anggaran pada masa pandemi dan pascapandemi, di mana perubahan kebijakan dan kondisi ekonomi turut memengaruhi pola perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur. Analisis hubungan linier antara efisiensi dan efektivitas melalui uji korelasi memungkinkan peneliti mengidentifikasi keberadaan fenomena *efisiensi semu*, yakni kondisi ketika serapan anggaran yang tinggi tidak sejalan dengan peningkatan kualitas hasil pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur mengenai hubungan

efisiensi dan efektivitas dalam kerangka VfM, tetapi juga memberikan landasan empiris bagi evaluasi kebijakan pembangunan daerah agar tidak terjebak pada capaian administratif semata, melainkan berorientasi pada kualitas *outcome* yang berkelanjutan.

Penelitian ini dibatasi oleh periode pengamatan lima tahun sehingga bersifat deskriptif dan tidak diarahkan pada generalisasi inferensial. Data yang digunakan seluruhnya merupakan data sekunder dari instansi pemerintah, sehingga ketepatannya bergantung pada konsistensi pelaporan. Fokus analisis hanya pada jalan provinsi, tidak mencakup jaringan jalan lain.

## **BAHAN DAN METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk mengevaluasi kinerja anggaran pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan deskriptif dipilih karena tujuan utama penelitian adalah menggambarkan tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran selama periode penelitian, bukan melakukan generalisasi atau pengujian hipotesis dengan tingkat inferensi yang tinggi. Selain itu, jumlah observasi yang terbatas tidak memenuhi prasyarat statistik untuk analisis inferensial yang robust, sehingga metode deskriptif merupakan pendekatan yang paling tepat secara metodologis.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari instansi terkait, seperti DBMBK, BKAD, dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Data sekunder ini meliputi pagu anggaran, realisasi anggaran, serta persentase Kemantapan Jalan selama periode 2020-2024. Seluruh data bersifat historis dan diperoleh melalui studi dokumentasi.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, tahap pengumpulan data, yaitu menghimpun data anggaran dan capaian kinerja fisik dari laporan resmi pemerintah daerah untuk periode 2020–2024. Kedua, tahap pengolahan data, yaitu melakukan perhitungan Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitas sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Mahmudi (2019). Perhitungan efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran terhadap pagu anggaran, sedangkan efektivitas dihitung melalui perbandingan realisasi Kemantapan Jalan terhadap target tahunan. Ketiga, tahap interpretasi data, yaitu memberikan makna terhadap nilai-nilai rasio berdasarkan kriteria kategorisasi standar. Dalam tahap ini, data hasil perhitungan tidak ditafsirkan secara inferensial melainkan dijelaskan melalui pendekatan deskriptif untuk menggambarkan kecenderungan kinerja anggaran tiap tahun.

Kriteria kategorisasi efisiensi dan efektivitas mengacu pada standar Mahmudi (2019), yang membagi tingkat efisiensi ke dalam kategori tidak efisien, kurang efisien, cukup efisien, efisien, dan sangat efisien. Sementara itu, efektivitas dikategorikan menjadi tidak efektif, kurang efektif, cukup efektif, efektif, dan sangat efektif. Kategorisasi ini menjadi dasar dalam menilai capaian kinerja masing-masing tahun serta mengidentifikasi pola hubungan antara kualitas serapan anggaran dan hasil fisik pembangunan jalan.

Dalam penelitian ini, uji normalitas serta uji korelasi disertakan sebagai bagian dari pemeriksaan karakteristik data guna mengidentifikasi konsistensi pola hubungan antarvariabel. Seluruh hasil pengujian tersebut tidak digunakan untuk menarik kesimpulan inferensial karena ukuran sampel yang terbatas dan desain penelitian yang bersifat deskriptif. Dengan demikian, interpretasi utama tetap berfokus pada analisis deskriptif, sedangkan temuan dari uji statistik tersebut hanya berfungsi sebagai indikasi pendukung yang tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan.

Penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kecenderungan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mengidentifikasi kecocokan atau ketidaksesuaian antara daya serap anggaran dan capaian *outcome* fisik dalam kerangka VfM. Pengukuran kinerja dilakukan dengan pendekatan VFM (Mardiasmo, 2018), yang terdiri dari dua tahapan utama:

1. Pengukuran Rasio Kinerja Efisiensi dan Efektivitas: Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan realisasi anggaran terhadap pagu anggaran. Secara matematis, efisiensi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Dinas}}{\text{Anggaran Dinas}} \times 100\%$$

Efisiensi anggaran belanja dinilai efisien apabila telah sesuai dengan kriteria tingkat efisiensi, adapun kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja dapat dilihat pada Tabel 1:

**Tabel 1. Kriteria Efisiensi.**

Persentase Kinerja	Kriteria Efisiensi
> 100%	Sangat Efisien
100%	Efisiensi
90% - 99%	Cukup Efisien
75% - 89%	Kurang Efisien
< 75%	Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi, 2019

Tingkat efektivitas diukur dengan membandingkan persentase Kemantapan Jalan yang direalisasikan terhadap target yang ditetapkan. Kedua rasio ini diklasifikasikan menggunakan kriteria baku (Mahmudi, 2019). Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Output}}{\text{Target Output}} \times 100\%$$

Efektivitas anggaran belanja dikatakan efektif apabila pelaksanaannya memenuhi kriteria tangka efektivitas yang telah ditetapkan, adapun kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja dapat dilihat pada Tabel 2:

**Tabel 2. Kriteria Efektivitas.**

Persentase Kinerja	Kriteria Efisiensi
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak efektif

Sumber: Mahmudi, 2019

2. Pemeriksaan Statistik Dasar: Sebelum pengujian korelasi, dilakukan uji normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk menilai karakteristik dasar data. Seluruh uji tersebut digunakan sebagai pemeriksaan pendukung dan tidak dimaksudkan untuk memenuhi asumsi regresi, mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan jumlah observasi yang terbatas (Halim, 2020).

Hasil perhitungan rasio dan uji korelasi kemudian diinterpretasikan secara deskriptif untuk menyimpulkan keberhasilan pengelolaan anggaran dalam kerangka VFM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

#### Pengukuran Rasio Efisiensi dan Efektivitas

Guna mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran pada DBMBK, dibutuhkan data mengenai anggaran belanja serta realisasi anggaran selama periode 2020-2024. Informasi tersebut umumnya tersedia dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), adapun data mengenai anggaran belanja dan realisasi dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3. Anggaran, realisasi, dan sisa anggaran DBMBK Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020-2024.**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (RP)	Sisa Anggaran (RP)
2020	1.081.070.151.180	723.110.151.180	357.959.898.743
2021	1.125.710.089.060	1.045.300.404.343	80.409.684.717
2022	734.923.173.358	528.802.287.801	206.120.885.557
2023	237.185.583.109	215.944.746.763	21.240.836.346
2024	429.576.926.560	412.318.238.458	17.258.688.102

Sumber: DBMBK Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2025

Bagian ini turut menyajikan data hasil pengolahan dari instansi terkait, yakni Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, yang menjadi dasar utama dalam pengujian Value for Money selama periode 2020-2024. Temuan penelitian diuraikan melalui penyajian rasio efisiensi yang merefleksikan tingkat penyerapan anggaran dan rasio efektivitas yang menggambarkan capaian kemandapan jalan.

### Analisis Efisiensi Anggaran Belanja

Efisiensi menggambarkan tingkat optimalitas pemanfaatan input anggaran dalam menghasilkan output pembangunan. Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan antara realisasi anggaran dan pagu anggaran yang telah ditetapkan. Indikator tersebut secara khusus menilai kemampuan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyerap dana publik yang dialokasikan secara tepat dan proporsional.

**Tabel 4. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Penggunaan Anggaran DBMBK Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020–2024.**

Tahun	Persentase Kinerja (%)	Kriteria
2020	66,89	Tidak efisien
2021	92,86	Cukup Efisien
2022	71,95	Tidak efisien
2023	91,04	Cukup Efisien
2024	95,98	Cukup Efisien
<b>Rata-rata</b>	<b>83,74</b>	<b>Kurang efisien</b>

Sumber: Hasil perhitungan data, tahun 2025

Hasil perhitungan efisiensi penggunaan anggaran DBMBK Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020–2024 disajikan pada Tabel 4. Nilai efisiensi menunjukkan variasi setiap tahun, bergerak dalam rentang kategori tidak efisien hingga cukup efisien sesuai kriteria yang digunakan.

### Analisis Efektivitas Pembangunan Jalan

Efektivitas menunjukkan sejauh mana *output* yang direncanakan telah tercapai. Indikator efektivitas dalam penelitian ini menggunakan persentase kemantapan jalan provinsi, yaitu proporsi panjang jalan dalam kondisi baik terhadap total panjang jalan yang ada.

**Tabel 5. Efektivitas Penggunaan Anggaran Pembangunan Jalan pada DBMBK Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2020–2024.**

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Kinerja (%)	kriteria
2020	65,61	65,90	100,44	Sangat Efektif
2021	72,30	70,01	96,83	Cukup Efektif
2022	74,00	71,95	95,92	Cukup Efektif
2023	75,09	75,38	100,39	Sangat Efektif
2024	75,08	71,42	95,12	Cukup Efektif
<b>Rata-rata</b>	<b>72,41</b>	<b>70,93</b>	<b>97,74</b>	<b>Cukup Efektif</b>

Sumber: Hasil perhitungan data, tahun 2025

Hasil perhitungan efektivitas berdasarkan capaian Kemantapan Jalan ditunjukkan pada Tabel 5. Nilai efektivitas menunjukkan kecenderungan stabil dan



berada pada kategori cukup efektif hingga sangat efektif. Capaian kemantapan jalan relatif mendekati target yang ditetapkan.

### Uji Korelasi dan Pemeriksaan Asumsi Dasar Data

Sebelum dilakukan uji korelasi Pearson, terlebih dahulu dilakukan uji statistik deskriptif dan uji normalitas untuk menilai karakteristik dasar data. Pemeriksaan ini dilakukan semata-mata untuk memahami pola distribusi data dan tidak dimaksudkan sebagai pemenuhan asumsi analisis parametrik, mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan jumlah observasi yang terbatas.

### Uji statistik deskriptif

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum terhadap nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi dari variabel efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

**Tabel 6. Statistik Deskriptif.**

	<b>Efisiensi</b>	<b>Efektivitas</b>
<i>Mean</i>	83,74	97,74
<i>Std. Dev.</i>	13,31	2,51
<i>Jarque-Bera</i>	0,73	0,67
<i>Probabilitiy</i>	0,69	0,71
<i>Obsrvations</i>	5	5

Sumber: Hasil Komputasi Menggunakan Eviews, 2025

Berdasarkan tabel 6, hasil uji statistik deskriptif terhadap variabel efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2020–2024 memperlihatkan nilai rata-rata dan sebaran variabel efisiensi dan efektivitas yang merepresentasikan pola capaian penggunaan anggaran pada rentang pengamatan.

### Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data efisiensi dan efektivitas berdistribusi normal.

**Tabel 7. Uji Normalitas.**

<i>Jarque-Bera</i>	0,74
<i>Propability</i>	0,68

Sumber: Hasil Komputasi Menggunakan Eviews, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 7, menunjukkan distribusi data berada pada rentang yang dapat diterima untuk kebutuhan analisis deskriptif.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi mengalami gejala heteroskedastisitas, yaitu kondisi di mana varian error tidak konstan dari satu observasi ke observasi lainnya.

**Tabel 8. Uji Heteroskedastisitas.**

		<b>Prob. F (2,2)</b>	0,94
<i>Obs*R-squared</i>	0,25	<i>Prob. Chi-Square (2)</i>	0,88
<i>Scaled explained SS</i>	0,01	<i>Prob. Chi-Square (2)</i>	0,99

Sumber: Hasil Komputasi Menggunakan Eviews, 2025

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang ditunjukkan pada Tabel 8, diketahui bahwa varians residual yang stabil sepanjang periode observasi.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji adanya korelasi antara residual pada suatu periode dengan residual pada periode lainnya. Residual merupakan selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual.

**Tabel 9. Uji Autokorelasi.**

<b>F-Statistic</b>	1,45	<b>Prob. F (2,1)</b>	0,50
<i>Obs*R-squared</i>	3,72	<i>Prob. Chi-Square (2)</i>	0,15
<i>Durbin-Watson stat</i>	0,75		

Sumber: Hasil Komputasi Menggunakan Eviews, 2025

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada Tabel 9, menunjukkan bahwa tidak terdapat pola korelasi serial antar residual dalam rentang pengamatan.

### Uji Korelasi Pearson

Uji korelasi Pearson dilakukan untuk mengetahui arah dan tingkat hubungan linier antara dua variabel yang berskala interval atau rasio. Dalam penelitian ini, uji korelasi Pearson digunakan untuk mengukur hubungan antara efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2020–2024.

**Tabel 10. Uji Korelasi Pearson.**

<b>Correlation Propability</b>	<b>Efektifitas</b>	<b>Efisiensi</b>
Efektivitas	1,00	
	-----	
Efisiensi	-0,33 0,58	1.00
		-----

Sumber: Hasil Komputasi Menggunakan Eviews, 2025

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 10, Uji Korelasi Pearson menghasilkan koefisien korelasi negatif sebesar  $r = -0,33$  dengan probabilitas

sebesar 0,58. Hasil ini disajikan sebagai informasi deskriptif mengenai arah dan kekuatan kecenderungan hubungan antara efisiensi dan efektivitas, tanpa digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan inferensial.

## **PEMBAHASAN**

Pembahasan ini mengintegrasikan hasil penelitian dengan kerangka teoritis *Value for Money* guna memahami dinamika efisiensi penyerapan anggaran dan efektivitas capaian kemantapan jalan di Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2020–2024. Melalui pendekatan analitis yang bersifat deskriptif, temuan disandingkan dengan literatur manajemen keuangan publik untuk memberikan interpretasi yang lebih komprehensif terhadap variasi kinerja yang terjadi selama lima tahun pengamatan.

### **1. Variasi Efisiensi Penyerapan Anggaran**

Fluktuasi efisiensi penyerapan anggaran yang terlihat pada periode 2020–2024 menunjukkan adanya dinamika dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program infrastruktur jalan. Nilai efisiensi yang rendah pada beberapa tahun dapat dikaitkan dengan kendala administratif seperti keterlambatan pelaksanaan program, penyesuaian anggaran, serta hambatan pengadaan barang dan jasa. Temuan ini sejalan dengan Mahmudi (2019) yang menyatakan bahwa efisiensi sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan anggaran, kapasitas pengadaan, dan efektivitas proses pelaksanaan program.

Selama masa pandemi dan transisi pascapandemi, banyak pemerintah daerah mengalami penyesuaian struktur belanja yang memengaruhi kecepatan dan ketepatan realisasi anggaran (Kementerian Keuangan RI, 2021). Hal tersebut turut menjelaskan mengapa nilai efisiensi pada beberapa tahun tidak stabil. Dari perspektif manajemen publik, variasi efisiensi menunjukkan perlunya perencanaan berbasis kebutuhan, sinkronisasi jadwal pengadaan, serta mekanisme monitoring yang adaptif untuk menjaga konsistensi realisasi anggaran (Halim & Kusufi, 2017).

Sebaliknya, tahun dengan efisiensi lebih tinggi menunjukkan adanya perbaikan koordinasi antarunit, kesiapan proyek yang lebih baik, atau percepatan realisasi anggaran setelah hambatan struktural berkurang. Dengan demikian, variasi efisiensi ini menegaskan bahwa keberhasilan penyerapan anggaran tidak hanya ditentukan oleh besarnya pagu, tetapi terutama oleh kelancaran proses administrasi serta konsistensi perencanaan dan pelaksanaan.

### **2. Stabilitas Efektivitas Capaian Kemantapan Jalan**

Nilai efektivitas yang relatif stabil menunjukkan bahwa capaian kemantapan jalan pada umumnya sesuai dengan target yang ditetapkan setiap tahun. Fenomena ini menggambarkan bahwa kinerja teknis pembangunan jalan mampu dipertahankan meskipun realisasi anggaran tidak selalu bergerak searah. Stabilitas efektivitas tersebut mendukung pandangan bahwa efektivitas sebagai ukuran outcome tidak selalu merupakan refleksi langsung dari efisiensi input fiskal (Mardiasmo, 2018; OECD, 2019).

Namun demikian, kesesuaian capaian fisik dengan target perlu dibaca secara hati-hati karena perubahan target kemantapan, perbedaan klasifikasi jalan, dan kondisi lingkungan dapat memengaruhi hasil pengukuran. Oleh sebab itu, efektivitas tidak dapat dipandang sebagai indikator tunggal keberhasilan pembangunan infrastruktur, melainkan harus dilihat dalam relasinya dengan kualitas perencanaan, mutu pelaksanaan teknis, dan stabilitas kebijakan daerah.

### **3. Pola Hubungan Deskriptif antara Efisiensi dan Efektivitas**

Hasil penelitian menunjukkan hubungan negatif antara efisiensi dan efektivitas, namun karena jumlah observasi terbatas, hasil tersebut hanya dapat digunakan sebagai indikasi pola dan tidak dapat dijadikan dasar generalisasi atau kesimpulan kausal. Hal ini sejalan dengan pedoman analisis data terbatas (Gujarati & Porter, 2009) yang menyatakan bahwa korelasi pada sampel kecil tidak memiliki kekuatan inferensial, tetapi tetap dapat memberikan gambaran awal mengenai dinamika dua variabel dalam suatu periode pengamatan.

Arah hubungan negatif tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan realisasi anggaran tidak selalu diikuti oleh peningkatan capaian kemantapan jalan. Pola seperti ini dapat mencerminkan adanya faktor teknis, manajerial, atau administratif yang menjadi penghubung antara input fiskal dan outcome fisik. Meski demikian, hubungan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut menggunakan desain penelitian yang lebih kuat dan data yang lebih panjang.

### **4. Faktor-Faktor Ketidaksejajaran Efisiensi Dan Efektivitas**

Ketidaksejajaran antara efisiensi dan efektivitas dapat muncul karena beberapa penyebab: *Pertama*, Ketidaksesuaian antara volume pekerjaan, spesifikasi teknis, dan kemampuan anggaran dapat menyebabkan terjadinya gap antara input dan output (World Bank, 2020). *Kedua*, Hambatan pada tahapan lelang dapat menghasilkan realisasi anggaran yang terkonsentrasi pada akhir tahun, sehingga kualitas output berisiko tidak optimal (LKPP, 2022). *Ketiga*, Faktor kondisi cuaca, ketersediaan material, dan karakteristik topografi menjadi penentu keberhasilan pekerjaan jalan (Suprayitno & Yuwono, 2018). *Keempat*, Revisi indikator atau penyesuaian target dalam dokumen perencanaan dapat memengaruhi nilai efektivitas tanpa mencerminkan perubahan realitas capaian fisik (Bappenas, 2019).

### **5. Anomali Kinerja Tahun 2024**

Anomali tahun 2024 merupakan temuan paling signifikan dalam penelitian ini. Pada tahun tersebut, tingkat efisiensi penyerapan anggaran berada pada kategori tinggi dan didukung oleh peningkatan alokasi nominal yang sangat besar. Namun demikian, capaian kemantapan jalan justru mengalami kontraksi. Ketidaksejajaran ini mencerminkan adanya *structural mismatch* antara realisasi input dan hasil fisik.

Potensi penyebab fenomena seperti ini, antara lain: percepatan pengadaan pada akhir tahun yang tidak diimbangi kesiapan teknis (LKPP, 2022); pekerjaan

tahun jamak (multiyears) yang hasil fisiknya belum terakumulasi penuh (Suprayitno & Yuwono, 2018); serta kapasitas kontraktor atau pengawas yang tidak sebanding dengan lonjakan volume pekerjaan. Oleh karena itu, temuan 2024 menjadi sinyal penting bagi perlunya audit teknis dan administratif pada level proyek untuk memastikan bahwa peningkatan anggaran tidak menghasilkan *inefficient spending*.

Temuan penelitian ini menguatkan pandangan bahwa dua indikator VfM efisiensi dan efektivitas tidak dapat dipisahkan, tetapi juga tidak dapat diasumsikan bergerak searah. Efisiensi mengukur penggunaan input, sedangkan efektivitas menggambarkan pencapaian hasil; keduanya dapat dipengaruhi oleh faktor yang berbeda, baik administratif maupun teknis (OECD, 2019).

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran dan efektivitas capaian kemantapan jalan tidak selalu bergerak searah, sehingga kinerja pembangunan infrastruktur tidak dapat dinilai dari serapan anggaran saja. Variasi efisiensi menggambarkan pengaruh faktor administratif dan pengadaan, sementara efektivitas yang relatif stabil menunjukkan konsistensi kinerja teknis. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan perencanaan berbasis kinerja, kualitas pengadaan, dan pengawasan mutu agar penggunaan anggaran menghasilkan outcome yang optimal. Keterbatasan penelitian terletak pada jumlah observasi yang terbatas dan ketergantungan pada data sekunder, sehingga analisis lanjutan dengan variabel teknis lebih detail direkomendasikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- 1) Anggriani, F. (2024). Implementasi fungsi pengawasan DPRD Kab. Karawang terhadap pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2020 mengenai APBD bidang infrastruktur.
- 2) Arisandy, A., & Lestari, W. (2021). Efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 12(2), 150–165.
- 3) Azifi, M. R., & Marliyah. (2022). Analisis fungsi dan peran DPRD dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Medan. *Jisma: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(5), 729–736. <https://doi.org/10.59004/jisma.v1i5.250>.
- 4) Bappenas. (2019). *Pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah*. Jakarta: Bappenas.
- 5) Bastian, I. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

- 6) Danial, K. H. (2020). Analisis sistem pertanggungjawaban anggaran di ESDM Sulawesi Selatan
- 7) Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
- 8) Halim, A. (2020). *Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- 9) Halim, A., & Kusufi, M. (2017). *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- 10) Hardani, A., Nurrohman, A., & Utami, L. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- 11) Jarkasih, M., Ruliana, T., & Rachmawati, I. (2020). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
- 12) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan kinerja anggaran tahun 2021*. Jakarta: Kemenkeu.
- 13) Kristiano, R., & Suryana, S. (2019). Perkembangan sarana dan prasarana transportasi dalam hubungannya dengan tingkat perekonomian masyarakat di Desa Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Geografi Gea*, 19(2), 131–140.
- 14) LKPP. (2022). *Laporan pengadaan pemerintah tahun 2022*. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 15) Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- 16) Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintahan daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- 17) Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- 18) Mustafah, J. (2016). *Tips menulis karya ilmiah: Makalah, penelitian, skripsi, tesis dan disertasi*. Jakarta: Kencana.
- 19) OECD. (2019). *Government at a Glance*. Paris: OECD Publishing.
- 20) Putra, I. G. A. (2021). Analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pada pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 8(1), 45–57.
- 21) Rachmawati, D., & Suryanto, S. (2020). Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pembangunan di pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(3), 217–229.

- 22) Rahayuningsih, T. W., Igrisa, I., & Sulila, I. (2024). Penerapan prinsip-prinsip good governance pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo. *Public Administration Journal (PAJ)*, 1(1), 1–5.
- 23) Santoso, B. (2023). Pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik: Studi kasus pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 11(3), 200–217.
- 24) Sari, R. (2023). *Analisis pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan* (Disertasi doctoral). Universitas Hasanuddin.
- 25) Sugiyono, (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- 26) Suprayitno, H., & Yuwono, T. (2018). *Manajemen infrastruktur jalan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- 27) Usman, R. (2025). Evaluasi efisiensi anggaran belanja modal dalam pembangunan infrastruktur. *Aset Tetap: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 22–29.
- 28) Wayan, N., Mia, D., Dewi, K., Heny, M., & Dewi, U. (2021). Pengaruh belanja daerah dan pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud)*, Bali, Indonesia, 334–360.
- 29) Widodo, R., & Purnama, S. (2022). Evaluasi efisiensi anggaran belanja modal dalam pembangunan infrastruktur di pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 100–115.
- 30) Widyawati, N., & Purwanti, P. (2025). Penggunaan anggaran sebagai alat pengendalian kinerja dalam organisasi. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 665–669.  
<https://doi.org/10.47233/jipm.v2i1>
- 31) World Bank. (2020). *Public expenditure review: Improving expenditure efficiency*. Washington, DC: World Bank Group.
- 32) Zanuardi, A., Suprayitno, H., & Budianto, H. (2020). Pemanfaatan prinsip *value for money* dalam penentuan prioritas pemeliharaan jalan (Studi kasus: Jalan nasional di Kota Surabaya). *Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum*, 10(1).